

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa depan. Suatu bangsa dikatakan berhasil membangun pendidikan dengan baik, maka dia mampu memberikan kontribusi kemajuan di berbagai bidang. Dalam bentuk ini pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi modal manusia (*Human Investment*) yang akan menentukan kualitas sumber kemajuan dan kemakmuran. daya manusia (SDM) suatu bangsa dan pada gilirannya akan membawa bangsa tersebut mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Perkembangan pendidikan di Indonesia semakin pesat. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan Kurikulum 2013. Menurut Mendikbud Muhammad Nuh (2013), alasan perubahan kurikulum, bahwa jaman berubah, maka kurikulum harus lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hafalan semata (dalam Hidayat 2013, [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)). Perubahan kurikulum ini sontak membuat kaget sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terutama bagi para pelaksana pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan peserta didik.

Inti dari Kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Dalam Kurikulum 2013 terdapat perubahan untuk semua mata pelajaran, diantaranya mata pelajaran IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia/Inggris, dan PKn. Tujuan dari perubahan Kurikulum 2013 untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Kemendikbud, 2013). Perubahan Kurikulum 2013 harus disikapi, diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum merupakan jembatan dan jantungnya pendidikan yang akan menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Interaksi yang baik dan dinamis antar anggota sekolah menjadi penting guna tercapainya tujuan pendidikan.

Dalam konteks otonomi daerah kebijakan pendidikan diarahkan pada pola desentralisasi sebagaimana dalam pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan yang semula bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Penerapan desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bukti nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya di sekolah. Kurikulum sebagai upaya untuk mempengaruhi siswa supaya belajar baik, dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun diluar sekolah. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses belajar mengajar.

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah, No. 19/2005 tentang Standar Nasional pendidikan pasal 2, yakni : 1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. (1a) standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2) untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. 3) standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Sehubungan dengan itu, sejak ada perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 digulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari berbagai

kalangan, baik yang pro maupun yang kontra. Menanggapi hal ini pemerintah berusaha mengadakan sosialisasi di berbagai sekolah yang ada di Indonesia dengan semaksimal mungkin agar semua pihak yang terlibat dalam implementasinya paham dengan perubahan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan. Dalam hal ini seharusnya pemerintah mengembangkan desain yang jelas dan menyeluruh, agar konsep kurikulum yang diimplementasikan dapat di pahami oleh para pelaksana secara utuh, tidak dianggap secara parsial, keliru atau salah paham dan banyak menimbulkan berbagai persepsi terutama dikalangan guru sebagaimana banyak terjadi sekarang ini. Karena kesiapan guru lebih penting dari pada pengembangan kurikulum 2013. Kenapa guru menjadi lebih penting? sebab guru dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.

Guru dalam melaksanakan program pembelajaran mampu memahami kurikulum dan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga untuk menjabarkan indikator kedalam tujuan pembelajaran tidak mengalami kesulitan dan pengelolaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) dapat dikembangkan sesuai dengan standar proses pendidikan oleh setiap guru bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang sesuai dengan kondisi sekolah dan tingkat kemampuan peserta didik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dilokasi penelitian, dimana peneliti menemukan bahwa ada beberapa yang menjadi masalah dalam implementasi kurikulum 2013 yakni: Sumber daya manusia (SDM) belum semaksimal mungkin memahami tentang kurikulum 2013, sarana dan prasarana yang masih kurang. Hal ini terlihat saat guru mempersiapkan perangkat dalam pembelajaran, masih ada beberapa guru yang masih belum terbiasa dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dan ketersediaan buku-buku penunjang yang belum memadai, oleh karena itu sangat diharapkan agar bantuan dari berbagai pihak terkait masalah kurikulum 2013.

Berdasarkan dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Kurikulum 2013 Di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo”*. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hambatan dalam implemtasi kurikulum 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana pengawasan kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo ?

4. Bagaimana evaluasi kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo ?
5. Bagaimana hambatan kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perencanaan kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengawasan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
4. Untuk mengetahui evaluasi Kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
5. Untuk mengetahui hambatan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Sekolah diharapkan dapat merangsang kegiatan ilmiah yang lebih mendalam tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SMP Negeri Widyakrama.
2. Bagi Guru penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan demi tercapainya proses pendidikan disekolah.

3. Bagi Dinas pendidikan diharapkan penelitian ini bisa membantu mengetahui perkembangan pelaksanaan kurikulum 2013 yang ada di sekolah.
4. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan wawasan dan keilmuan khususnya dalam pengembangan kurikulum 2013.